

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta

Susilawati¹, Rifa Fattasya Khalida²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung

e-mail:susilawati@digitechuniversity.ac.id¹, rifa10219062@digitechuniversity.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Bandung III Soekarno Hatta. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data penghapusan pajak kendaraan bermotor dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT III Soekarno Hatta Bandung tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dijadikan sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen laporan PAD yang dikendalikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan jenis data yang digunakan. Program penghapusan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota III Soekarno Hatta Kota Bandung, sesuai dengan analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hal ini menandakan jika pajak kendaraan bermotor dihapuskan, maka kantor SAMSAT Soekarno Hatta III Kota Bandung akan menerima lebih banyak uang dari pajak kendaraan bermotor tersebut.

Kata kunci: Pemutihan PKB, Penerimaan PKB, Peningkatan.

Abstract

The goal of this study is to determine how the motor vehicle tax write-offs program has affected the revenue generated by motor vehicle taxes at the SAMSAT Bandung III Soekarno Hatta office. This study is quantitative in nature. The data on motor vehicle tax write-offs and the total amount of motor vehicle tax revenues at the Bandung III Soekarno Hatta SAMSAT office between 2018 and 2022 serve as the population and sample in this study. Secondary data gathered through PAD report documents controlled by the Regional Revenue Agency of West Java Province is the type of data used. The motor vehicle tax write-off program had a favorable and significant impact on motorized vehicle tax revenue at the SAMSAT Bandung City III Soekarno Hatta Office, according to data analysis using simple linear regression analysis. Thus, if the government implements the scheme for writing off motor vehicle tax, it will result in a rise in motor vehicle tax collection at the Bandung City III Soekarno Hatta SAMSAT office.

Keywords: Tax Write-Offs Program, Revenue, Motor Vehicle Tax.

PENDAHULUAN

Pemerintah membuat program pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghilangkan atau membebaskan denda bagi pengemudi kendaraan bermotor. Keringanan pajak mencakup sejumlah inisiatif kebijakan yang berbeda, termasuk penghapusan denda pajak, pemberian keringanan pajak, diskon, dan pembebasan biaya transfer untuk kendaraan bermotor (BBNKB). Adanya program hapus pajak menguntungkan pemerintah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus meringankan beban pemilik mobil. Untuk meningkatkan

penerimaan pajak dan mengurangi tekanan terhadap wajib pajak yang menunggak, diharapkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor akan bersedia membayar pajaknya akibat skema penghapusan pajak ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan di kantor SAMSAT Soekarno Hatta Kota Bandung III dalam upaya menggenjot pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kajian kali ini menimbulkan pertanyaan tentang pajak kendaraan bermotor yang dipajang di kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta karena jumlah wajib pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, namun kenaikan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban pajak. Berikut adalah statistik pelaksanaan program tahun 2018 hingga 2022 yang disajikan oleh penulis dari Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta.:

Tabel 1 : Tabel Penerimaan PKB Dari Pelaksanaan Program Pemutihan PKB Pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun 2018—2022

TAHUN	PERIODE	WAKTU	PENERIMAAN PKB										JUMLAH	
			Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
2018	1 Jul - 31 Agu	2 Bulan	-	-	-	-	40,120,060,100	43,335,461,200	-	-	-	-	-	83,455,521,300
2019	10 Nov - 10 Des	1 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,914,644,800	43,066,996,500	76,981,641,300
2020	2 Mar - 31 Mei	8 Bulan	-	-	-	-	-	33,204,825,600	23,155,961,575	30,347,291,900	33,178,527,050	37,430,262,700	238,140,023,525	
	1 Agu - 23 Des	5 Bulan	30,960,025,300	25,283,990,200	24,579,139,200	-	-	37,012,064,600	34,883,440,800	33,212,993,500	37,223,564,700	46,477,225,400	188,809,289,000	
2021	1 Agu - 24 Des	5 Bulan	-	-	-	-	-	37,012,064,600	34,883,440,800	33,212,993,500	37,223,564,700	46,477,225,400	188,809,289,000	
2022	1 Jul - 31 Agu	2 Bulan	-	-	-	-	42,544,971,350	55,837,211,000	-	-	-	-	98,382,182,350	

Sumber : Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta

Berdasarkan tabel 1 ditampilkan besaran penerimaan program PKB yang diterima oleh kantor SAMSAT Soekarno Hatta III Kota Bandung selama periode tahun 2018–2022.

Tabel 2. Data Penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun 2018—2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
	Rp.	Rp.	%
2018	370,083,000,000	380,262,120,200	102,54%
2019	411,733,000,000	405,461,299,200	98,48%
2020	446,612,932,000	382,450,791,725	85,63%
2021	387,783,155,000	482,945,408,900	103,91%
2022	420,906,368,071	386,931,113,250	91,93%

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta

Berdasarkan tabel 2, penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT Bandung Kota III Soekarno Hatta tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan tingkat pencapaian target penerimaan yang diduga akibat dari kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam melaksanakan pemutihan PKB. program.

Hal-hal yang perlu dirumuskan dengan latar belakang tersebut di atas adalah: Berapa proporsi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Soekarno Hatta Kota Bandung III yang terkena program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah pembayaran wajib ke daerah yang dilakukan oleh orang atau badan atas dasar paksaan dan berdasarkan undang-undang, yang tidak langsung dibalas dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah memungut pajak daerah, yang kemudian digunakan untuk membiayai keluarga daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Waluyo (2019:272), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 12

UU PDRD. Kendaraan roda empat, termasuk trailernya, dirancang untuk digerakkan oleh peralatan teknis, seperti motor atau peralatan lain yang mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Ini termasuk alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor sebagai bagian dari operasinya tetapi tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemilik kendaraan yang memenuhi syarat untuk keringanan pajak atau pemutihan pajak otomatis dibebaskan dari sanksi pajak. Pengampunan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Waluyo (2017:407), adalah kebijakan perpajakan pemerintah yang membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak dengan cara memperbolehkan mereka untuk memotong pajak yang seharusnya mereka bayarkan pada tahun pajak tersebut. Tujuan utama membayar pajak ini adalah untuk mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan bagi badan pajak atau negara penerima.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam entri jurnalnya, Fina dan Hana (2022) mencatat bahwa penerimaan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, terdiri dari pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang menguraikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Diharapkan penerimaan pajak akan meningkat jika inisiatif penghapusan pajak pemerintah berhasil.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Penerimaan Perpajakan didefinisikan sebagai penerimaan Negara seluruhnya, yang meliputi Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

Hipotesis

Hipotesis yang dapat diajukan berdasarkan uraian tersebut adalah :

H₁: Penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

METODE

Teknik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang bertempat di Kantor SAMSAT Soekarno Hatta III Kota Bandung menjadi pokok bahasan penelitian penulis yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penerimaan PKB Tahun 2018–2022, di Kantor SAMSAT Soekarno Hatta III Kota Bandung, dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk penelitian ini, diperlukan satu set data yang berisi jumlah total penghapusan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Menggunakan data terdokumentasi berupa penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan kendaraan bermotor selama periode 5 tahun, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi standar dan uji statistik yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah uji normalis. dan uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana digunakan. Dalam penelitian ini digunakan uji parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R²) untuk menguji validitas hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	60	0	1	0.32	0.469
Y	60	22,580,556,100	55,837,211,000	33,155,324,471.38	5,620,320,266.284

Sumber:

Hasil olahan data SPSS 25

Nilai N atau jumlah total data yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 3. Statistik deskriptif untuk variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:

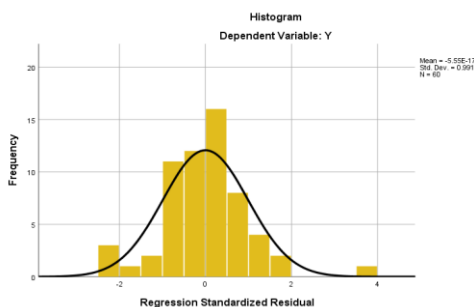
Data untuk variabel penghapusan pajak kendaraan bermotor berjumlah 60 sampel, seperti terlihat pada Tabel 3 di atas. Dengan nilai terendah 0 dan nilai maksimal 1, pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki rata-rata 0,32. Deviasi standar, yang saat ini 0,469, lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data atau penyimpangan data sangat minim. Ketika standar deviasi lebih rendah dari rata-rata, ada sedikit variasi dalam data. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa rata-rata pemutihan pajak kendaraan bermotor relatif tinggi, dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan nilai maksimal. Jadi semakin dekat atau tinggi nilai rata-rata dan nilai maksimal dapat diartikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tinggi.

Data variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor ditunjukkan pada Tabel 3 di atas dengan nilai minimal sebesar 22.580.556.100 dan nilai maksimal sebesar 55.837.210.000. Variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai rata-rata sebesar 33.155.324.471,38. Meski kurang dari norma, standar deviasi 5.620.320.266.284 tetap tinggi. Karena nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata yang menunjukkan data kurang variatif, hal ini menunjukkan bahwa variasi data minimal. Dengan membandingkan nilai rata-rata dengan nilai maksimum, dapat ditunjukkan dari statistik tersebut bahwa rata-rata penghapusan pajak kendaraan bermotor cukup signifikan. Semakin besar atau semakin dekat nilai maksimum dan nilai rata-ratanya, maka semakin besar pula penerimaan pajak kendaraan bermotor.

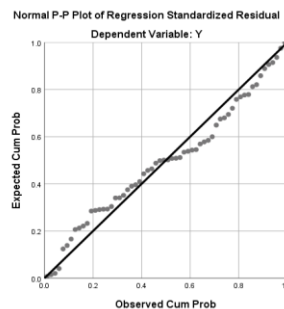
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel perancu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak.



Gambar 1. Grafik Histogram



Gambar 2. Normal Probability Plot

Jelas dari histogram dan grafik plot probabilitas normal bahwa distribusi data hampir normal karena baik kurva maupun garis normal tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti. Akibatnya, asumsi studi tentang normalitas adalah benar atau terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan perancu pada periode t-1 (sebelumnya) berkorelasi dengan kesalahan perancu dalam model regresi linier. Masalah autokorelasi adalah masalah di mana ada korelasi. Run test digunakan untuk menentukan apakah data residual terjadi secara sistematis atau arbitrer.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	15,995,335.17
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	33
Z	0.521
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.602
a. Median	

Sumber : Hasil olahan data SPSS 25

Diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,602 lebih besar dari 0,05 berdasarkan tabel 4 keluaran SPSS diatas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala maupun masalah autokorelasi. Untuk melanjutkan analisis regresi linier, masalah autokorelasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Durbin-Watson dapat diselesaikan dengan menggunakan uji lari.

3. Analisis Regresi Sederhana

Program SPSS 25 digunakan untuk melakukan analisis regresi langsung untuk menilai arah dan besaran dampak pemutihan PKB (X) terhadap penerimaan PKB (Y). Di bawah ini adalah temuan analisis regresi linier langsung:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	31,793,922,214.829	826,323,487.298		38.476	0.000
	X	4,299,165,020.697	1,468,415,371.101	0.359	2.928	0.005
a. Dependent Variable: Y (Penerimaan)						

Sumber: Hasil olahan data SPSS 25

Persamaan regresi linier sederhana ditunjukkan sebagai berikut berdasarkan informasi pada tabel di atas :

$$Y = 31,793,922,214.829 + 4,299,165,020.697 X$$

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar 31.793.922.214.829 menunjukkan bahwa rata-rata nilai konsisten Pendapatan (Y) sebesar 31.793.922.214.829 jika kedua variabel independen tersebut dijadikan konstanta.

b. Persepsi (X)

4.299.165.020.697 adalah nilai koefisien X. Menurut perhitungan ini, Pendapatan PKB (Y) akan tumbuh sebesar 4.299.165.020,697 untuk setiap kenaikan

1% pada tingkat Pemutihan PKB (X).

Hasil uji t menunjukkan bahwa berdasarkan model di atas, variabel penghapusan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor juga mempengaruhi pendapatannya. Dimana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi baik sebagian maupun keseluruhan oleh pemutihan pajak tersebut.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur dengan menggunakan uji Koefisien Determinasi atau dikenal juga dengan uji (R²). Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1..

Tabel 6. Hasil Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.359 ^a	0.129	0.114	5291051949.479
a. Predictors: (Constant), X (<u>Pemutihan PKB</u>)				
b. Dependent Variable: Y (<u>Penerimaan PKB</u>)				

Sumber: Hasil olahan data SPSS 25

Berdasarkan data tersebut di atas, nilai R adalah 0,359 yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Y yaitu Penerimaan PKB di kantor SAMSAT Bandung III Soekarno Hatta dipengaruhi oleh variabel X yaitu Penerimaan PKB. Sebaliknya, nilai R square pada tabel di atas adalah 0,129 atau 12,9%, yang menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh prediktif terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya, 87,1%, berasal dari 100% - 12,9% = 87,1% dari Penerimaan PKB (Y) karena adanya variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

2. Uji Parsial (Uji t)

Untuk memastikan apakah variabel independen secara parsial signifikan terhadap variabel dependen, gunakan uji t. Ho ditolak jika t hitung melebihi t tabel, sedangkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31793922214.829	826323487.298		38.476	0.000
	X	4299165020.697	1468415371.101	0.359	2.928	0.005
a. Dependent Variable: Y (<u>Penerimaan PKB</u>)						

Sumber: Hasil olahan data SPSS 25

Nilai t yang ditentukan adalah 2,928 seperti yang terlihat pada tabel output di atas. Nilai t tabel dengan taraf sig pada n = 60 dan k = 2. 0,05 adalah 1,67065 atau 1,671. karena 2.928 lebih besar dari 1.671 pada t-aritmatika. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ho diterima sedangkan Ha ditolak, hal ini membuktikan bahwa "Pemutihan PKB (X)

berdampak pada Penerimaan PKB (Y)". Jadi, penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh pemutihan pajak kendaraan bermotor baik secara parsial maupun signifikan.

PEMBAHASAN

Sebuah program pemerintah yang dikenal sebagai "pemutihan pajak" menghilangkan denda pajak atau amnesti yang dinilai kepada pemilik mobil.

Menurut temuan studi tersebut, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor meningkat sebagai akibat dari pemutihan pungutan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penghapusan pajak yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut pada saat membayar di kantor SAMSAT Soekarno Hatta III Kota Bandung. Oleh karena itu, penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin baik dengan semakin besarnya penghapusan pajak kendaraan bermotor.

Perpajakan dan pemutihan pajak ini saling terkait erat. Ketika dipraktikkan, skema pajak mobil dapat meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan membantu pembayar pajak menghapus pajak yang sebelumnya dikenakan karena mereka terlambat membayar. Wajib Pajak yang memanfaatkan program penghapusan pajak secara efektif pasti akan menyadari dan menghargai banyak keuntungannya dalam membantu mereka membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian Fina & Hana (2022), Putri & Astri (2021), Fachrel et al (2022), Paparang et al (2020), dan Ekasari & Akbari (2017), pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat dan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghapusan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka jumlah uang yang terkumpul dari pajak juga akan meningkat, yang memungkinkan pemerintah untuk membayar komitmen pajaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa penghapusan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi penghapusan pajak, semakin banyak uang yang diterima SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta dalam bentuk pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotornya melalui program yang dikeluarkan pemerintah yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT terdekat..
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk mengidentifikasi faktor tambahan yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dkk. 2020. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus. Penerbit : Salemba Empat.
- Ekasari, L. D. & Akbari, F. 2017. TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial* Vol.1 No.2 (2017)
- Fachrel, I. & Lili, I., & Yanti, R. 2022. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Journal* Vol.3 No 1 Oktober 2022, pp. 93-99.
- Fina, B. & Hana, F. 2022. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Padjajaran I Kota Bandung. *Jurnal*

- Riset Akuntansi dan Perbankan Vol.16 No 1 Februari 2022, Hal 657-672. ISSN 2088-5008. E-ISSN 2722-4104.
- Ghozali, Imam. 2018. APLIKASI ANALISIS MULTIVE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25 (Edisi 9). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Paparang & Taroreh & Honandar. (2020). Pengaruh Persepsi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Uptd Ppd Di Sangihe Talaud Sitaro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara). Skripsi Thesis, Universitas Katolik De La Salle.
- Putri A. & Astri D. 2021. Analisis Efektifitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol.2 No. 2, hlm. 76-85. pISSN 2723-0104. eISSN 2723-0090.
- Sugiyono dan Agus Susanto. 2017. CARA MUDAH BELAJAR SPSS DAN LISREL. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta : Salemba Empat